



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDA
KALTIM

2022

*BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH*

BERANI UNTUK **KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.9.6.3 / 289 / B.Um-Bapp /2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2022

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana laporan kinerja dimaksud adalah sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2022 di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk tim pengarah, pelaksana dan sekretariat yang ditetapkan melalui Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Permen PANRB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2022**
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Kaltim Tahun 2022;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Plt. Kepala,



Yusliando

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 000.9.6.3 / 289 / B.Um-Bapp / 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim
2. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim
3. Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Kaltim
4. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Seluruh Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Prov. Kaltim
2. Kasubbag Umum Bappeda Prov. Kaltim

III. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kasubbag Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
Anggota : 1. Ardian Nur, S.STP
2. Hendro Prowodadi
3. Kartinem
4. Rusman
5. Tony Kurniawan Shidiq, S.Kom
6. Wirayudha Nugraha, S.E.
7. Muhammad Riyan Alwin, S.Kom
8. Andi Muhammad Azmi Maulana

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Plt. Kepala,



Yusliando

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan sehingga kami diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan wujud transparansi serta akuntabilitas kepada berbagai pihak, *stakeholder* dan masyarakat selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta merupakan sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya atas disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, Februari 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pt. KEPALA



YUSLIANDO

NIP. 196710051998031009

SELAYANG PANDANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai tujuan organisasi menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023, yang kemudian mengalami revisi dan ditetapkan menjadi dokumen perubahan Renstra tahun 2019-2023. Sasaran strategis yang tertuang dalam perubahan Renstra terdiri dari tiga sasaran dan tiga indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap tiga sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Indikator **Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target**, dengan capaian kinerja 110,29%, dari target 85% dan terealisasi 93,75%. Capaian tersebut menggambarkan keberhasilan Bappeda dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta keberhasilan perangkat daerah pengampu dalam melaksanakan program prioritas pembangunan
2. Indikator **Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran**, dengan capaian kinerja 110,68%, dari target 90% dan terealisasi 99,61%. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang baik antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran

3. Indikator **Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim** dengan capaian kinerja 100,18%, dari target 79,46% dan terealisasi 79,60%. Capaian tersebut menggambarkan semakin baiknya kinerja pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Prov. Kaltim kepada seluruh perangkat daerah

Kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif dimana dari tiga target indikator kinerja sasaran strategis, seluruhnya mencapai target dengan rata-rata tingkat capaian 107,05% dengan predikat sangat tinggi. Capaian tersebut tentunya diikuti dengan realisasi dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
SELAYANG PANDANG	2
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	9
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	10
1. Tugas.....	10
2. Fungsi.....	10
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	13
E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM	16
F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS).....	17
G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS 2019-2023	20
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
C. PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Bappeda Tahun Sebelumnya.....	29
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	29
2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	30

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2022	32
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2022.....	33
SASARAN 1 Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah.....	35
SASARAN 2 Rencana Program/Kegiatan Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran.	78
SASARAN 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Internal dan Eksternal.	94
D. REALISASI ANGGARAN	103
1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	103
2. Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .	105
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia	13
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim.....	22
Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2022	23
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
Tabel 2.5 Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022	28
Tabel 2.6 Anggaran Per Sasaran Strategis	28
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Pada Implementasi SAKIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 – 2021	29
Tabel 3.2 Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi.....	30
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	32
Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	35
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2019 - 2023	36
Tabel 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	37
Tabel 3.9 Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	45
Tabel 3.10 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Program Prioritas Pembangunan yang mencapai target pada tahun 2022	61

Tabel 3.11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	72
Tabel 3.12 Rencana aksi dalam mendukung capaian sasaran I.....	73
Tabel 3.13 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	78
Tabel 3.14 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	79
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2019 - 2023	79
Tabel 3.16 Program/Kegiatan yang Konsistensi dan Inkonsistensi.....	80
Tabel 3.17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	83
Tabel 3.18 Rencana Aksi dalam mendukung capaian sasaran II	84
Tabel 3.19 Perbandingan antara target 2022 dan realisasi kinerja tahun 2022.....	94
Tabel 3.20 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	94
Tabel 3.21 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2019 - 2023.....	94
Tabel 3.22 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022.....	100
Tabel 3.23 Realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2022	101
Tabel 3.24 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	103
Tabel 3.25 Struktur belanja BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2022.....	105
Tabel 3.26 Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022.....	105
Tabel 4.1 Tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran strategi	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan	11
Gambar 1.2 Grafik Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan dan Gender	14
Gambar 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	15
Gambar 1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Gambar 1.5 Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Gambar 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	91
Gambar 3.2 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	91
Gambar 3.3 Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	92
Gambar 3.4 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	92
Gambar 3.5 Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan	93
Gambar 3.6 Sinergitas, sinkronisasi Renstra/Renja dengan dokumen RKPD/RPJMD.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah maka pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah perlu dilakukan. Pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Keberadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia
5. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
6. Pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kewilayahan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan

8. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
9. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

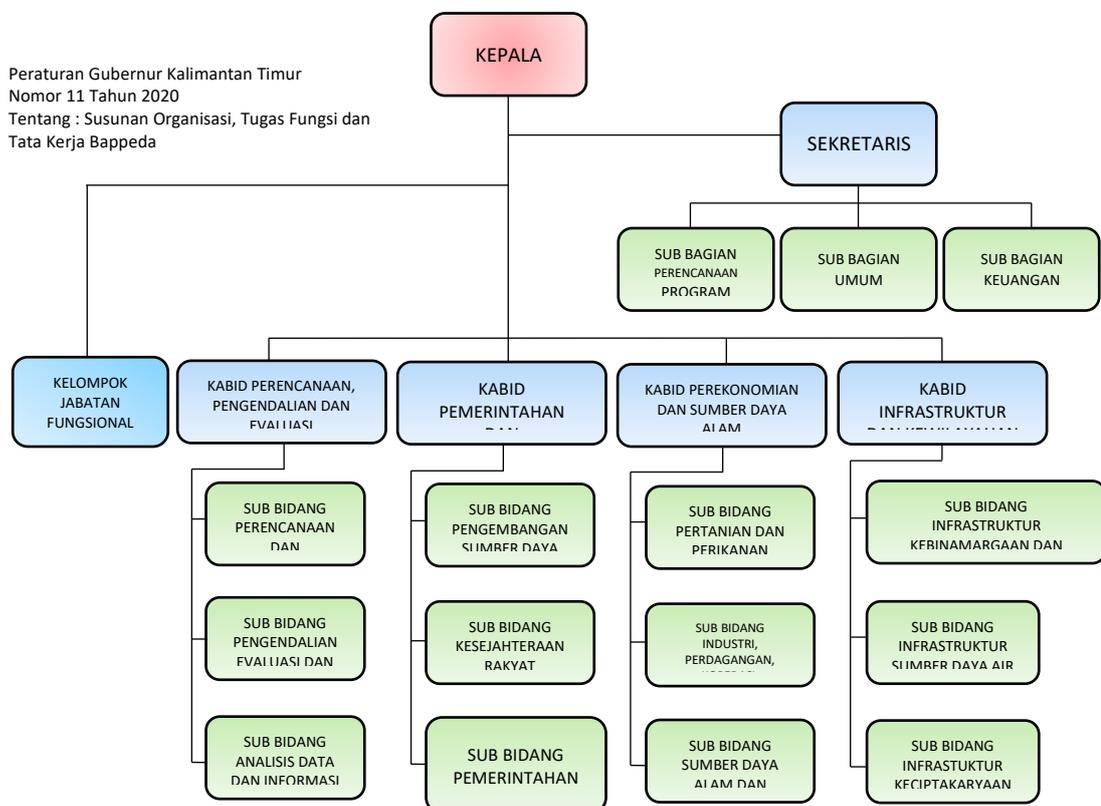
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Subbidang Analisis Data dan Informasi, Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Subbidang Pemerintahan;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Pertanian dan Perikanan, Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata, dan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan dan Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman.

Pada tahun 2022 terjadi penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, Penyetaraan ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Adapun jabatan pengawas di lingkungan Bappeda Prov. Kaltim yang mengalami penyetaraan yaitu seluruh Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Keuangan, sehingga pejabat eselon IV atau jabatan pengawas hanya diisi 2 Kepala Subbagian di Sekretariat, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan Program. Di bawah ini adalah struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana belum ada Peraturan terbaru terkait susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pasca penyetaraan ke jabatan fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan



D. SUMBER DAYA MANUSIA

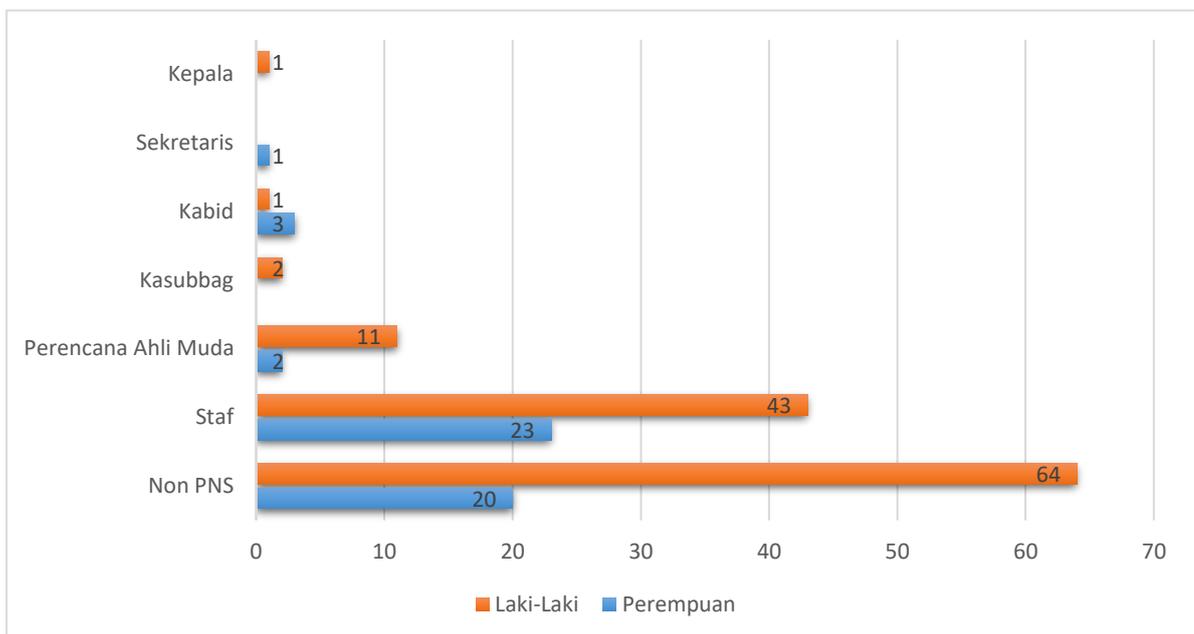
Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan. ASN merupakan orang-orang pilihan yang menduduki jabatan penting dan strategis sehingga perannya sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Berkenaan dengan itu diperlukan ASN yang handal memiliki kemampuan berpikir rasional dan logis, mampu berkomunikasi dan berkoodinasi dengan para pihak dan senantiasa berusaha melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh besar terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut sumber daya manusia pada Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan dan tingkat Pendidikan :

Tabel 1. 1
Jumlah Sumber Daya Manusia

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kepala Badan	1		1					1				
Sekretaris		1	1				1					
Kabid	1	3	4				4					
Kasubbag	2			2			1	1				
Perencana Ahli Muda	11	2	1	12			5	8				
Staf	43	23	1	31	32	2	2	19	7	35	1	2
Jumlah Pegawai ASN	58	29	8	45	32	2	13	29	7	35	1	2
Jumlah Pegawai Non ASN	64	20					3	43	3	31	3	1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN	122	49					16	72	10	66	4	3

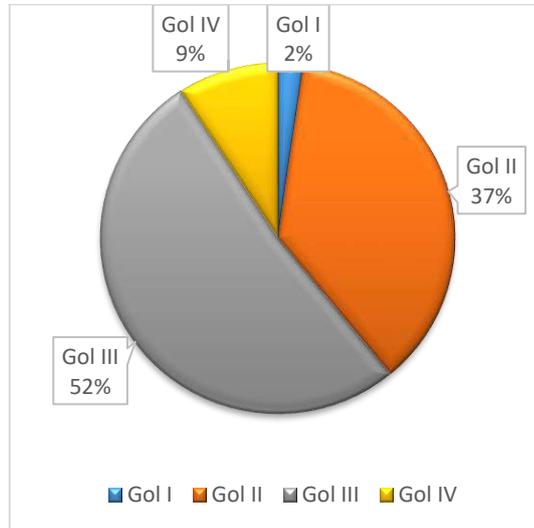
Sampai dengan Desember 2022, Jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang Tenaga PNS dan 84 (Delapan Puluh Empat) orang Pegawai Non PNS, sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bappeda sejumlah 171 orang.

Gambar 1.2
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan
Jabatan dan Gender



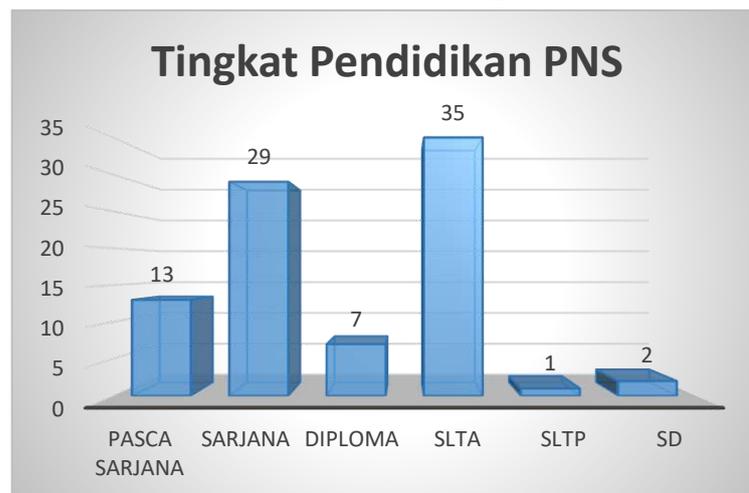
Dari **Gambar 1.2** dapat dilihat komposisi jabatan struktural organisasi Bappeda Prov.Kaltim berdasarkan gender adalah : 1 (satu) orang laki-laki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Plt. Kepala Bappeda, 5 (lima) orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (satu) orang perempuan pada jabatan Sekretaris, 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki di jabatan Kepala Bidang, 2 (dua) orang Plt. Kepala Sub Bagian, 13 (tiga belas) orang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda terdiri 2 (dua) orang perempuan dan 11 (sebelas) orang laki-laki, 66 Orang staf PNS terdiri 23 (dua puluh tiga) orang perempuan dan 43 (empat puluh tiga) orang laki-laki serta 84 Orang Pegawai Non PNS terdiri dari 20 (dua puluh orang) perempuan dan 64 (enam puluh empat) orang laki-laki.

Gambar 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan



Pada gambar 1.3 dapat dilihat persentase jumlah PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Pangkat/Golongan, Golongan IV berjumlah 8 (delapan) Orang (9%), Golongan III berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang (52%), Golongan II berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang (37%), Golongan I berjumlah 2 (dua) orang (2%).

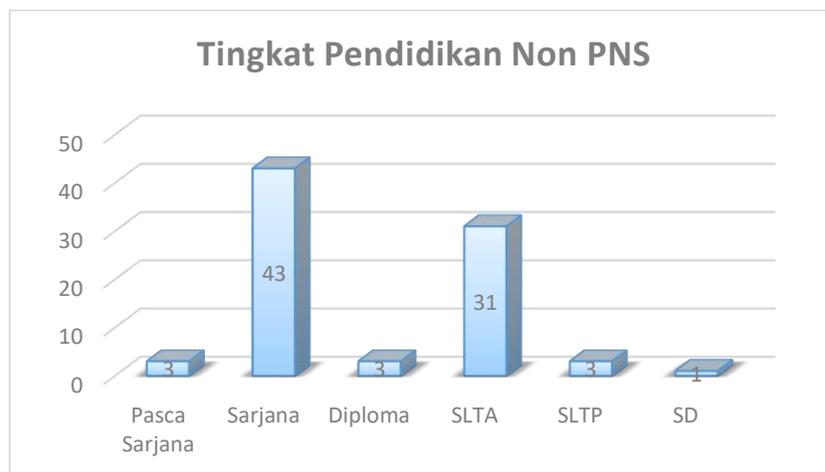
Gambar 1.4
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4 secara ringkas menggambarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat Pendidikan, terdiri dari Pendidikan Pasca Sarjana 13 (tiga belas) orang, Pendidikan Sarjana 29 (dua puluh sembilan) orang,

Pendidikan Diploma 7 (tujuh) orang, Pendidikan SLTA 35 (tiga puluh lima) Orang, Pendidikan SLTP 1 (satu) orang dan Pendidikan SD 2 (dua) orang.

Gambar 1.5
Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada gambar 1.5 menggambarkan jumlah pegawai non PNS Berdasarkan tingkat Pendidikan, Pendidikan Pascasarjana 3 (tiga) orang, Pendidikan Sarjana 43 (empat puluh tiga) orang, Pendidikan Diploma 3 (tiga) orang, Pendidikan SLTA 31 (tiga puluh satu) orang, Pendidikan SLTP 3 (tiga) orang dan Pendidikan SD 1 (Satu) orang.

E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut.

Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bappeda harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan perbaikan, penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : (1) Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid; (2) Keterbatasan tenaga analis data dan informasi; (3) proses *updating* data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan: (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); (2) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; (3) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; (4) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;
5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu - isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas SDM

4. Penyediaan dan pemutakhiran data/Informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM

**Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	8.700	m ²
2	Bangunan Gedung terdiri : a. Ruang Kerja b. Ruang Rapat c. Ruang GSCC d. Ruang Server e. Mushola f. Ruang saji g. Ruang Laktasi h. Gedung Arsip i. Kantin j. Gudang k. Tempat Parkir	6.525 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1	m ² Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
3	Listrik	6	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	12	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	3	Area
7	Koperasi	1	Unit
8	Taman Dalam	2	Area

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2019-2023

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan renstra memiliki **tujuan** sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja, maka visi dan misi didalam dokumen RPJMD diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan Bappeda Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Prov. Kaltim juga dilakukan perubahan dan ditetapkan melalui Pergub Kaltim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan peran sebagai perangkat pemerintahan daerah, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Adapun perumusan tujuan, sasaran beserta Program/Kegiatan secara singkat tersaji dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja			Skor	76,55	76,55	76,60	76,65	77,00	78,00
		Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	-	-	-	65	85	95
		Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	-	-	-	85	90	95
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	-	-	-	79,44	79,46	79,55

Tabel. 2.2.
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	
					6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					9. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
					10. Administrasi Umum Perangkat Daerah
					11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama**

Tugas	: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan 3. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia; 5. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam; 6. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan; 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan 8. Pelaksanaan administrasi Bappeda Sesuai dengan lingkup tugasnya 9. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan tugasnya
IKU	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah 2. Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	Jumlah Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Prioritas Pembangunan x 100%	Evaluasi RPJMD	Kepala Bappeda

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
2	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Anggaran /Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen perencanaan x 100%	RPJMD, RKPD	Kepala Bappeda
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	<p>a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11)+ (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)</p> <p>b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi.</p> <p>c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111,</p> <p>d. IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25</p>	Quesioner	Kepala Bappeda

C. PERJANJIAN KINERJA

Tabel. 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	85
2	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	90
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	79,46

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp43.672.801.516,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp52.088.997.516,- dengan rincian Belanja Operasi Rp49.303.580.916,- dan Belanja Modal Rp2.785.416.600,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp46.293.662.546,- (88,87%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp43,942,408,033,- (89,13%) dan Belanja Modal sebesar Rp2.351.254.513,- (84,41%)

2. Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022

**Tabel. 2.5.
Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	49.303.580.916	43,942,408,033	89,13%
2	Belanja Modal	2.785.416.600	2.351.254.513	84,41%
Jumlah		52.088.997.516	46.293.662.546	88,87%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2022 Bappeda Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.6.
Anggaran Per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	11.670.429.760	11.035.622.206	94,56
2	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	9.160.309.800	8.727.207.666	95,27
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	31.258.257.956	26.530.832.674	84,88

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Bappeda Tahun
Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi Pada Implementasi SAKIP
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020-2021

No	Komponen yang Dinilai	Bobot 2020	Bobot 2021	Nilai 2020	Nilai 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Kinerja	30	30	25,93	25,28	-0,65
2	Pengukuran Kinerja	25	25	20,63	16,56	-4,07
3	Pelaporan Kinerja	15	15	13,56	13,56	-
4	Evalusai Kinerja	10	10	5,99	4,87	-1,12
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	20	12,08	14,29	2,21
	NILAI HASIL EVALUASI	100	100	78,19	74,56	-3,63
	KATEGORI PENILAIAN			BB	BB	

Sumber : Surat hasil penilaian evaluasi sakip tahun 2020 dan 2021 oleh Inspektorat

Pada tabel 3.1 dapat dilihat tingkat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bappeda Prov. Kaltim pada tahun 2020 dan 2021. Jika disandingkan pencapaian tahun 2021 dengan 2020 maka nilai hasil evaluasi SAKIP menunjukkan penurunan, tingkat penurunan sebesar -3,63 dengan penyumbang penurunan penilaian terbesar pada komponen pengukuran kinerja dengan tingkat penurunan -4,07, kemudian evaluasi kinerja -1,12 dan perencanaan kinerja -0,65.

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Prov. Kaltim terhadap sistem akuntabilitas kinerja Bappeda di tahun 2021, maka diberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Bappeda sebagai bahan perbaikan di tahun mendatang sebagai berikut:

**Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/ Belum
1.	Perjanjian Kinerja dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan, capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan, memilah yang berkinerja dan tidak berkinerja serta digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat suatu keadaan.	Memberikan penghargaan kepada KPA dan PPTK terbaik dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran	Sudah
2.	Capaian target pada Rencana Aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dimonitoring kemajuannya, setiap ada penyimpangan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya serta terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru.	Monitoring Rencana Aksi yang dilakukan per triwulan sebagai berikut : 1. Rapat dengan penghubung; 2. Rapat dengan PPTK; 3. Rapat dengan KPA.	Sudah
3.	Rencana Aksi dimanfaatkan tidak terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tetapi diikuti dengan tindakan nyata seperti target-target kinerja pada Rencana Aksi dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan dan dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan serta terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran yang akan dicapai.	Adanya rapat masing-masing bidang terkait rencana kerja	sudah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/ Belum
4.	Mekanisme pengumpulan data kinerja mencantumkan alur yang jelas jika terjadi kesalahan data dan memiliki tingkat kesalahan yang minimal.	Perbaikan dan penyesuaian SOP Mekanisme pengumpulan data kinerja	Sudah
5.	Seluruh target yang terdapat dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulan/semester).	Pengukuran dilakukan dengan menginput realisasi kinerja pada aplikasi Evdoren	Sudah
6.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.	Aplikasi E-kinerja, pengukuran secara berjenjang	sudah
7.	Terhadap implementasi pengukuran kinerja, agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dapat dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i> yang sebanding dengan hasil pengukuran/capaian kerjanya.	Capaian kinerja dijadikan dasar untuk pemberian reward	sudah
8.	Pemantauan rencana aksi dilakukan periodik triwulanan dengan kriteria terdapat informasi tentang capaian hasil rencana, terdapat simpulan keberhasilan rencana, terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya rencana serta terdapat ukuran keberhasilan rencana.	Adanya rapat dan notulen terlampir	sudah
9.	Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti	(Tabel rencana aksi 2022)	sudah
10.	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program sehingga terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan/kegagalan program dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah/akan ditindaklanjuti.	Adanya rapat dan notulen renja	sudah
11.	Evaluasi program yang dilaksanakan disertai dengan rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tersebut disetujui untuk ditindaklanjuti.	Telah dilaksanakan Evaluasi Program (Notulen Rapat)	sudah
12.	Pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat	Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan (Foto Rapat Bidang)	sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/ Belum
	dilaksanakan supaya terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan.		
13.	Hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode sehingga menggambarkan realisasi capaian kinerja dan keuangan serta dilakukan setiap triwulan.	Adanya rapat hasil evaluasi (evdoren, Notulen rapat dan Foto)	sudah
14.	Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.	Hasil evaluasi program digunakan untuk Penyusunan renja tahun berikutnya dalam rangka perbaikan tahun sebelumnya	sudah
15.	Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti.	Tabel Evaluasi rencana Aksi tahun 2022	sudah
16.	Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome sehingga yang akan datang pencapaian sasaran/kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.	Capaian Tahun 2022 lebih tinggi daripada capaian tahun 2021	sudah
17.	Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal.	Laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang	Sudah

Sumber : Surat hasil penilaian evaluasi sakip tahun 2021 oleh Inspektorat

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2022

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	93,75	110,29

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	90	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	90	99,61	110,68
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	79,46	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	79,46	79,60	100,18

Berdasarkan Tabel 3.3. diatas, target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis ditampilkan pada akhir periode/triwulan IV karena capaian indikator sasaran strategis tersebut merupakan capaian *outcome* yang baru dapat diukur dan bergantung pada kinerja organisasi pada akhir periode/triwulan IV.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2022

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2022 merupakan Tahun ke-IV dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu:

**Tabel 3.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE KRITERIA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

SASARAN 1. Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	%	85	93,75	110,29

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	%	43,09	93,75	50,66

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target Renstra Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	%	95	93,75	98,68

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2022 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2022. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2022, ***“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”***. Daya saing daerah yang masih rendah menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan untuk pembangunan tahun ke-4 pada periode RPJMD, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor

pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;

4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN;
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan mengacu pada P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sehingga strategi dan arah kebijakan pada tahun 2022 mengalami perubahan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan P-RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja 2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School) 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan daya saing generasi muda	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
		2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
		2. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor
		3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi
		2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan
		3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	tanaman pangan dan hortikultura	2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan
		2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit
		3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani
		5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan
		2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan
		3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan	
	2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	
	3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan	

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara 2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik 3. Pemantauan komitmen perizinan 4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM 2. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital 3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM 4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	1. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim
		2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	Pengembangan ekonomi kreatif	1. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim 2. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan		
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN
2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang		
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, program prioritas Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami perubahan yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9

Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
PRIORITAS PEMBANGUNAN 1									
Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM								1.115.059.137.488	
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25					
	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82%	935.553.720.692	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	9%	2.366.889.475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1%	1.139.430.728	Dinas Pemuda dan Olah Raga

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	70%	51.945.295.523	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100%	115.136.354.121	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Kab/Kota yang memiliki \geq 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60%	3.550.891.935	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	1.843.190.185	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,64	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.016.080.817	Dinas Kependudukan , Pemberdayaan Perempuan dan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
									Perlindungan Anak
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,00					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75					
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	35,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	204.132.915	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2.303.151.097	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2									
Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat								324.846.091.678	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,00					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75					

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6825	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara Optimal	35 Desa	1.990.178.289	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	30 Desa	3.535.597.003	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1					
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170					
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00					
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00					

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0,65	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/ Dipelihara	1 Unit	513.766.446	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	80000 Ha	4.716.890.000	
						Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi padi	279681 Ton	25.533.110.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
						Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	283592 Ton		
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 orang	3.693.331.700	Dinas Pangan, Tanaman

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
						Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koperasi yang dibina	4 lembaga		Pangan dan Hortikultura
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	10.087.388.200	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	21%	7.387.968.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	5,20	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067 Juta Ton CO2eq	1.120.000.000	Dinas Perkebunan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	6.722.948.500	Dinas Perkebunan
						Luas Kebun yang dibangun	1.462.645 Ha		

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490,20 ton	6.465.557.600	Dinas Perkebunan
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	3.734.806.900	Dinas Perkebunan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	750.000.000	Dinas Perkebunan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,70	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90 Ha	4.057.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	19.425.875.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	5.306.947.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan yang dipasarkan	3 Jenis	1.463.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,07	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 ha	25.209.625.775	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000 /ton	179.984.157.525	Dinas Kehutanan
						Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5 juta ton		
	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	%	13,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	946.405.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10%	576.519.240	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
									Usaha Kecil Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	1.226.724.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	7.602.445.000	Dinas Pariwisata
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	%	15,23	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53%	2.794.999.500	Dinas Pariwisata
PRIORITAS PEMBANGUNAN 3 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan								32.427.153.764	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1					
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170					
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00					
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00					
	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah	Miliar Rp	11.038	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100 %; 108.243 Wajib Pajak	1.633.400.000	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	100%	11.471.100.000	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara	Miliar US\$	1,72	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	1.097.068.680	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB	%	9,64	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 industri	3.022.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Triliun Rp	35,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	3.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100%	1.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,05					
	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU	%	28,50	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	53,80	6.767.500.000	Dinas Lingkungan Hidup

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,16		
				Indeks Kualitas Lahan (IKL)		79,86			
				Indeks kualitas air laut (IKAL)		83,61			
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,49	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82,67%	3.235.585.084	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN								1.059.058.668.461	
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini	Indeks	0,313					
	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87%	5.005.777.515	Dinas Perhubungan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
		Jumlah barang yang diangkut	Ton	337.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 Kasus	18.601.404.483	Dinas Perhubungan
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung	Kawasan	5	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76,15%	656.550.082.427	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Capaian akses air minum layak	%	68,53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66,64%	148.692.890.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.278,50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	70,50 %	85.936.542.880	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
		Luas kawasan kumuh	Ha	1.187,82	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70.781 unit	47.763.345.840	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Luas genangan banjir perkotaan	Ha	374	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	31.387.530.016	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	76,74	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,91 indeks	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Rasio Elektrifikasi	%	93,00	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	7,34%	2.920.731.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.165.000 KK	54.200.364.300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik								18.863.177.452	
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (71,50)					
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,10	5.136.725.291	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25					
	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,00	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	79%	1.357.460.000	Sekretariat Daerah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
						Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79%	2.302.775.000	Sekretariat Daerah
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	10.066.217.161	Inspektorat

Sumber : P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022

Tabel 3.10
Target, realisasi dan tingkat capaian
program prioritas pembangunan yang mencapai target Pada tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	%	9,19	10,64	116	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	82	83,3	102	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	70	71	101	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	1	0,88	88	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS	Kab/Kota	3	3	100	Dinas Kesehatan
[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	%	100	100	100	Dinas Kesehatan
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki \geq 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	%	40	70	175	Dinas Kesehatan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1	100	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[PROGRAM] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	Desa	35	35	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	Desa	30	38	127	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
[PROGRAM] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	%	70	62,22	89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[PROGRAM] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	31	68,43	221	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	739	697	94	Badan Pendapatan Daerah
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	%	100	127	127	Badan Pendapatan Daerah
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	%	5	15,85	317	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Industri	2	2	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	48.258	151	Dinas Kehutanan
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.000.000	4.471.286,16	89	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	700	826,05	118	Dinas Kehutanan
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	297.805,90	293.030,78	98	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	164.441	161.230	98	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	162.593	177.514	109	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2eq	4,067	7,92	195	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Jenis	3	3	100	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ;	Ha	8.000	8.000	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	7	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;	Kelompok	30	36	120	Dinas Perkebunan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	2) Luas Kebun yang dibangun	Ha	1.462.645	1.575.966	108	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49	49	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ;	Ton	279.681	280.665	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.592	319.257	113	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton	18.126.490,20	17.022.588	94	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	%	21	21	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ;	Orang	330	333	101	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	Lembaga	4	4	100	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga	1	1	100	Dinas Perkebunan
[PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	35	36	103	Dinas Perkebunan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	11	5	220	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	%	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	%	1	4,84	484	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	%	10	13	130	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	%	3	36,2	1.207	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	23,53	23,53	100	Dinas Pariwisata
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Destinasi	3	3	100	Dinas Pariwisata
[PROGRAM] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	70.781	70811	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	meter	3.020	2723,7	90	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	%	66,64	69,28	104	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	%	7,34	7,27	99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.165.000	1.197.475	103	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87	85	98	Dinas Perhubungan
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	%	76	76,95	101	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	76,15	77,52	102	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	kasus	427	195	219	Dinas Perhubungan
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	indeks	0,91	0,92	101	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Target Kinerja dan Capaian Kinerja				Perangkat Daerah
		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ;	Indeks	53,8	53,02	99	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ;	Indeks	89,16	87,59	98	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;	Indeks	79,86	81,85	102	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	Indeks	83,61	81,45	97	Dinas Lingkungan Hidup
[PROGRAM] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	%	82,67	82,67	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	indeks	80	97,84	122	Dinas Komunikasi dan Informatika
[PROGRAM] PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	%	79	89,19	113	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	%	95	91,89	97	Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79	81,03	103	Sekretariat Daerah
[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	86,5300006	96	Inspektorat

Untuk menghitung program prioritas pembangunan yang mencapai target, realisasi indikator program dengan tingkat capaian ($91% < 100%$) dijadikan tolak ukur keberhasilan dan dianggap telah mencapai target. Adapun target, realisasi dan tingkat capaian program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Target indikator “persentase prioritas pembangunan yang mencapai target” tahun 2022 adalah 85% dan realisasi sebesar 93,75% yang diperoleh dari menghitung jumlah prioritas pembangunan yang mencapai target terhadap jumlah seluruh prioritas pembangunan, dari 64 prioritas pembangunan terdapat 60 prioritas pembangunan yang mencapai target dan 4 prioritas pembangunan yang belum mencapai target. Sehingga hasil persentase prioritas pembangunan yang mencapai target diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Prioritas Pembangunan yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh prioritas pembangunan}} \times 100\%$$

$$= \frac{60}{65} \times 100\% = 93,75\%$$

Prioritas pembangunan yang mencapai target tidak lepas dari faktor-faktor pendorong sebagai berikut :

1. Adanya komitmen, KAK kegiatan yang jelas serta perencanaan yang baik dari seluruh perangkat daerah pengampu sehingga program-program prioritas pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana
2. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara perangkat daerah, *stakeholder* dan pengambil kebijakan dalam pencapaian target pembangunan
3. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah
4. Adanya dukungan regulasi yang baik terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan

5. Meningkatnya mobilitas masyarakat ditengah PPKM level 1 serta dukungan akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur
6. Pelayanan transaksi pembayaran yang semakin mudah dengan transaksi digital
7. Adanya relaksasi pajak yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan menstimulus pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
8. Adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota serta swasta pada setiap pelaksanaan pembangunan daerah
9. Adopsi teknologi dan repon masyarakat yang baik terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan
10. Tersedianya dukungan teknologi informasi dalam memudahkan pelaksanaan program yang mencakup wilayah kerja yang sangat luas

Disamping pencapaian target indikator sasaran I yang sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa program prioritas pembangunan yang belum mencapai target (<91%) yang dipengaruhi beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih minimnya kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kreatifitas pemuda, kepeloporan pemuda dan kepemimpinan pemuda. Pembinaan kepemudaan secara menyeluruh tidak dapat hanya dilaksanakan oleh satu instansi (Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan)
2. Kesempatan lapangan kerja bagi lulusan pelatihan kerja masih minim (Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja)
3. Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu (Program pengelolaan hutan kayu) menurun karena adanya beberapa faktor :

- Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu;
 - Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktifitas alat rendah;
 - Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya sparespart dll.
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase:
- Pelaksanaan konstruksi bersamaan dengan proses pengadaan lahan;
 - Terdapat pemilik lahan yang tidak diketahui identitasnya;
 - Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian realisasi kinerja sasaran I menunjukkan peningkatan sebesar 50,66% dengan realisasi di tahun 2021 43,09% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 93,75%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya komitmen Bappeda dan SKPD pengampu dalam bersinergi untuk mencapai program-program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022.

Kemudian jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir perubahan Renstra 2019-2023, capaian realisasi sudah menunjukkan progres yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 93,75% dengan tingkat kemajuan 98,68%. Tentunya merupakan capaian yang sangat positif dan diharapkan pada periode akhir Renstra ditahun 2023, target prioritas pembangunan daerah dapat tercapai ataupun melebihi target yang telah ditetapkan.

Melihat beberapa indikator program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022 yang belum mencapai target, maka dibutuhkan alternatif solusi dalam rangka meningkatkan capaian

prioritas pembangunan di tahun berikutnya, Adapun alternatif solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar instansi (Provinsi dan Kab/Kota), stakeholder dan pengambil kebijakan dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
2. Mendorong kemudahan investasi di wilayah Kalimantan Timur untuk menciptakan lapangan kerja serta menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dan balai pelatihan dalam penyerapan tenaga kerja
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi hasil hutan kayu yaitu:
 - a) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial;
 - b) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan;
 - c) Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui system
4. Dalam pembangunan drainase hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Persiapan penyiapan lahan;
 - b) koordinasi antar instansi;
 - c) sosialisasi terhadap pemilik lahan;
 - d) komitmen pemerintah setempat dalam penyiapan lahan drainase

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dalam pencapaian *output* tersebut dapat menggunakan sumber daya

(input) seminimal mungkin. Dalam melaksanakan dukungan program guna Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran strategis satu:

Tabel 3.11
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022

1	2	3	%	%	Tingkat Efisiensi
			Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	110,29	94,56	15,73

Pada tabel 3.11 dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target sudah efisien dengan tingkat efisiensi 15,73% dengan perhitungan capaian kinerja-penyerapan anggaran ($110,29 - 94,56 = 15,73\%$).

Hal ini tergambar dari penyerapan anggaran yang berbanding lurus dengan hasil capaian kinerja yang diinginkan, mengingat Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki cakupan wilayah kerja yang begitu luas dalam mengakomodir seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis I telah terlaksana dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, namun belum sepenuhnya yang mencapai target. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja beberapa organisasi perangkat daerah pengampu program prioritas pembangunan.

Komitmen Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dibuktikan dengan Langkah rencana aksi sebagai berikut :

**Tabel 3.12
Rencana aksi dalam mendukung capaian sasaran I**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	%	78	11.670.429.760		
A.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	85	3.836.542.000		
1.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	Laporan	1	199.604.000	A.	Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
2.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	Dokumen	1	298.518.000	A.	Pra Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Musrenbang Prov. Kaltim Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
3.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD	Dokumen	1	3.338.420.000	A.	Penyusunan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Perubahan	Dokumen	1		B.	Penyusunan P-RKPD Tahun 2022
						C.	Workshop Proyeksi Kebijakan Ekonomi Makro Daerah (KEMD)*
						D.	Workshop PPD
						E.	Analisis Data Bersama Bidang Perencana/SKPD dalam rangka Penyusunan RPD*
						F.	Koordinasi Penyusunan RPD dengan Perusahaan dan Mitra Pembangunan
						G.	Finalisasi Isu Strategis dan Gambaran Permasalahan Pembangunan RPD

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
						H.	Kick Off Meeting Penyusunan RPD 2024-2026 dan RKPD 2024
						I.	Konsinyasi Penyusunan RPD 2024-2026 dan RKPD 2024
B.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	%	93	2.132.520.900		
4.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan	Dokumen	2	1.181.370.400	A.	Penyusunan Analisis Ketimpangan Wilayah
						B.	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian (triwulanan)
						C.	Analisis Pembangunan Daerah
						D.	Penyusunan Bab 2 RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						E.	Pengembangan Aplikasi Geoportal
5.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	SKPD	38	483.568.500	A.	Pelaksanaan Forum Satu Data Kalimantan Timur
6.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah	Kabupaten/Kota	10	206.874.000	A.	Fasilitasi/Integrasi JIGD Kab/Kota
						B.	Rapat hasil evaluasi JIGD Kab/Kota
						C.	Rakor JIGD (Pembinaan Kab/Kota)
7.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Dokumen	3	260.708.000	A.	FGD Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
						B.	Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah
C.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian rencana Program/Kegiatan yang digunakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	%	85	5.701.366.860		
8.	Koordinasi Pengendalian	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi	Laporan	4	4.427.456.360	A.	Fasilitasi Kegiatan TGUP3 Prov. Kaltim

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota				B.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
						C.	Sosialisasi Penyusunan Evaluasi RPJPD
9.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah	Laporan	2	767.265.500	A.	Monitoring Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBD dan APBN
						B.	Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur
10.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil fasilitasi RKPD Murni Kab/Kota Laporan hasil fasilitasi RKPD Perubahan Kab/Kota	Laporan	1	506.645.000	A.	Verifikasi kelengkapan fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan konsultasi fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2023
						C.	Penyampaian surat hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota
						D.	Pengendalian tindak lanjut hasil fasilitasi RKPD Kab/Kota Tahun 2023
						E.	Verifikasi kelengkapan fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2022
						F.	Pelaksanaan konsultasi fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2022
						G.	Penyampaian surat hasil fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2022
						H.	Pengendalian tindak lanjut hasil fasilitasi P-RKPD Kab/Kota Tahun 2022

Sumber : Dok. Rencana Aksi Bappeda tahun 2022

Dapat dilihat pada tabel 3.12 Bappeda melalui bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah telah menyusun rencana aksi dan telah didukung dengan anggaran yang cukup. Rencana aksi tersebut juga menggambarkan bagaimana program dan kegiatan yang ada telah didukung dengan Langkah-langkah nyata dalam mencapai tujuan dalam pernyataan kinerja pada sasaran strategis I.

Bappeda memiliki satu program dan tiga kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran satu yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang kemudian didukung dengan tiga kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan dan pendanaan, memastikan tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (tahunan, menengah dan jangka Panjang) yang dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal pada rencana pembangunan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi, bertujuan untuk membahas rancangan rencana pembangunan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan
 - Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, hasil analisis data dan informasi digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang dilaksanakan dengan empat sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
 - Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk menghasilkan analisis data pembangunan yang nantinya digunakan dalam pertimbangan perumusan kebijakan pembangunan daerah

- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD, bertujuan dalam memberikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan kepada SKPD di Prov. Kaltim
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan dalam memberikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah kepada seluruh kab/kota di Prov. Kaltim
 - Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi, bertujuan untuk Menyusun profil pembangunan daerah provinsi kaltim
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, memastikan kesesuaian rencana Program/Kegiatan yang digunakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi yang dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan penunjang sebagai berikut:
- Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, bertujuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota
 - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk memonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang menggunakan APBD dan APBN
 - Sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memfasilitasi kab/kota dalam evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Kegiatan diatas memiliki andil dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan dan pendanaan yang memastikan program/kegiatan pembangunan telah direncanakan secara matang dan dengan pendanaan yang cukup, analisis data dan informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan, hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan yang digunakan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehingga kegiatan yang sangat mendukung dalam pencapaian kinerja pada sasaran satu adalah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dimana evaluasi atas pelaksanaan pembangunan termasuk evaluasi prioritas pembangunan daerah di tahun 2022 dilaksanakan pada sub kegiatan ini.

SASARAN 2. Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

**Tabel 3.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	90	99,61	110,68

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	96,97	99,61	2,64

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	95	99,61	104,85

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 menunjukkan realisasi yang positif, dimana target kinerja 90% dapat direalisasikan melampaui target sebesar 99,61% dengan tingkat capaian 110,68%. Berikut tabel

data program/kegiatan yang konsisten dan inkonsisten pada dokumen RKPD terhadap dokumen APBD berdasarkan urusan masing-masing bidang dan rekap seluruh bidang :

Tabel 3.16
Program/Kegiatan yang Konsisten dan Inkonsisten
pada dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen
anggaran

Bidang	Uraian	RKPD	APBD	Konsisten	Inkonsisten	Capaian
1	2	3	4	5	6	$7 = (5:4) \times 100\%$
SELURUH (PPM, PSDA, INFRASWIL)	Program	614	615	614	1	99,61
	Kegiatan	1452	1459	1452	7	
	Jumlah	2066	2074	2066	8	
PPM	Program	392	393	392	1	99,65
	Kegiatan	739	742	739	3	
	Jumlah	1131	1135	1131	4	
PSDA	Program	189	189	189	0	99,51
	Kegiatan	625	629	625	4	
	Jumlah	814	818	814	4	
INFRASWIL	Program	33	33	33	0	100
	Kegiatan	88	88	88	0	
	Jumlah	121	121	121	0	

Berdasarkan tabel 3.16 Bidang infrastruktur dan kewilayahan memiliki capaian kinerja paling baik dan memiliki andil yang paling besar terhadap capaian indikator kinerja dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dengan capaian program/kegiatan yang konsisten 100%. kemudian Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia sebesar 99,65% dengan 814 program/kegiatan konsisten dan 4 program/kegiatan yang inkonsisten, serta bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 99,51% dengan 1.131 program/kegiatan konsisten dan 4 program/kegiatan yang inkonsisten. Adapun rumus perhitungan dalam

menentukan keberhasilan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Anggaran}} \times 100\%$$

sehingga jika dimasukkan dalam perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{2066}{2074} \times 100\% = 99,61\%$$

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini tentunya tidak lepas dari beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi sudah berjalan baik antara bidang perencana dengan mitra perangkat daerah
2. Ketepatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi tahun 2021
3. Amanah Permendagri 86/2017 pasal 343 yang melarang melakukan penambahan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada tahap penganggaran (KUA-PPAS) diluar RKPD terkecuali keadaan darurat dan kebijakan nasional
4. Adanya atensi KPK melalui SE No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan seluruh proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran dan KPK akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses perencanaan dan penganggaran

Meskipun capaian kinerja indikator pada sasaran 2 dikatakan sangat baik, namun masih terdapat 8 program yang inkonsisten dengan rincian dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. 4 kegiatan nomenklatur RKPD terhadap APBD yang inkonsisten dibawah urusan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan, UPTD Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulan dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lingkup Balikpapan)

2. 1 program dan 3 kegiatan nomenklatur RKPD terhadap APBD yang inkonsisten dibawah urusan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Wilayah I dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
3. Terjadinya inkosistensi nomenklatur pada dokumen perencanaan terhadap dokumen anggaran disebabkan adanya program/kegiatan yang sebelumnya tidak direncanakan pada tahap perencanaan namun diusulkan pada anggaran perubahan namun tidak disetujui dan tidak jadi dilaksanakan karena berbenturan dengan Amanah Permendagri 86/2017 pasal 343 yang melarang melakukan penambahan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada tahap penganggaran (KUA-PPAS) diluar RKPD terkecuali keadaan darurat, kebijakan nasional.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian realisasi kinerja menunjukkan peningkatan sebesar 2,64%, dengan realisasi di tahun 2021 96,97% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 99,61%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya bidang perencana (PPM, PSDA, dan INFRASWIL) dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran.

Kemudian jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir perubahan Renstra 2019-2023, capaian realisasi sudah melampaui target (95%) dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 99,61% dengan tingkat kemajuan 4,61%. Tentunya merupakan capaian yang sangat positif dan diharapkan untuk terus dijaga dan ditingkatkan hingga periode akhir Renstra di tahun 2023.

Walaupun tingkat capaian realisasi di tahun 2022 mencapai 110,68% dan menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat baik jika disandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan target akhir Renstra Perubahan 2019-2023, namun tetap perlu dilakukannya perbaikan dan

peningkatan untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator guna menjaga konsistensi program/kegiatan dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran sebagai berikut :

1. Menjaga dan meningkatkan kinerja bidang perencana (PPM, PSDA, INFRASWIL) dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran.
2. Mengawal dan memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dengan benar dan sudah mengakomodir kebutuhan perangkat daerah serta telah sesuai dengan nomenklatur dan indikator program/kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah untuk menjaga keselarasan dokumen perencanaan dan konsistensi nomenklatur program/kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.17
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022**

1	2	3	%	%	Tingkat Efisiensi
			Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	110,68	95,27	15,41%

Pada tabel 3.17 dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Sasaran II dengan indikator persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran dapat disimpulkan penggunaan sumber dayanya sudah efisien dengan tingkat efisiensi 15,41% dengan perhitungan ($110,68\% - 95,27\% = 15,41\%$).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara umum capaian sasaran strategis Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran telah terlaksana dengan optimal. Hal ini tentunya tidak lepas dari komitmen bidang perencanaan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tentunya dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mendukung keberhasilan capaian pernyataan kinerja tersebut. Adapun strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bidang perencanaan yang dituangkan ke dalam rencana aksi sebagai berikut :

**Tabel 3.18
Rencana Aksi dalam mendukung capaian sasaran II**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi
II.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	%	90	9.160.309.800	

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	100	3.344.320.800		
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	635.579.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	Laporan	1	559.610.000	A.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan
3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	41.002.000	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan
4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	784.132.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
						F.	FGD Penanggulangan Kemiskinan, pengangguran, stunting dan kesetaraan gender
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	2	1.063.429.800	A.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia
6.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	2	260.568.000	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pembangunan Manusia
E.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	85	3.119.315.000		
7.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	636.660.000	A.	Rapat Penajaman Arah Pembangunan Kaltim dengan Sekretaris SKPD Lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
						B.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Perekonomian dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						C.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
						D.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
							Perkada RKPD Tahun 2023
						E.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Perekonomian dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						F.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
8.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	246.922.000	A.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
						B.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
9.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	Dokumen	2	941.218.000	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
						B.	Pelaksanaan RAD-PG 2021
						C.	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Nasional Sub Sektor Pertanian dan Perikanan /Asistensi DAK 2021
						D.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian (Bidang Pertanian, Perikanan, Indagkop, investasi dan pariwisata)
10.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	1	400.640.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
						F.	Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	88.400.000	A.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
						B.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
12.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	Dokumen	2	805.475.000	A.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
						B.	Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs
F.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	85	2.696.674.000		
13.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	795.545.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Infrastruktur dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
						F.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman
						G.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman
						H.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman
14.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Dokumen	1	1.088.979.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Infrastruktur dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
						F.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Uraian Rencana Aksi	
						G.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Wilayah
						H.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Wilayah
15.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	812.150.000	A.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Infrastruktur dengan Rancangan awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023
						B.	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
						C.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada RKPD Tahun 2023
						D.	Verifikasi kesesuaian rancangan Renja PD lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dengan Rancangan P-RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
						E.	Verifikasi Rancangan akhir Renja dengan Perkada P-RKPD Tahun 2022
						F.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
						G.	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
						H.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Sumber : Dok. Rencana Aksi Bappeda tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.18, Sasaran strategis II didukung 1 program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan 3 kegiatan disertai rencana aksi dan anggaran yang cukup untuk

menunjang pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Berikut dokumentasi singkat kegiatan bidang perencana (pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan) yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :

Gambar 3.1

Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan



Gambar 3.2

Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur



Gambar 3.3

Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur



Gambar 3.4

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan



Gambar 3.5

Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan



Gambar 3.6

Sinergitas, sinkronisasi Renstra/Renja dengan dokumen RKPD/RPJMD



SASARAN 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	79,46	79,60	100,18

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.20
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	-	79,60	79,60

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	%	79,55	79,60	100,06

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2019-2023
2. Perubahan RPJMD 2019-2023
3. RENSTRA 2019-2023
4. Perubahan Renstra 2019-2023
5. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim
6. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020
7. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021
8. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
9. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA LH
10. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
11. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
12. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
14. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
15. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan

16. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
17. Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
18. Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
19. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
20. Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau
21. Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
22. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
23. Dokumen Evaluasi RKPD
24. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
25. Laporan Penanggulangan Kemiskinan
26. RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
27. Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola *Availability Payment*
28. Sistem Informasi Data (SIDATA) Bappeda Prov. Kaltim
29. *e-Library* Bappeda Prov. Kaltim
30. Sistem *One Data One Map*
31. Sistem Evaluasi Dokumen Perencanaan (Evdoren)

Disamping itu, Bappeda dalam memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya Kementerian Dalam

Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
untuk menghitung capaian Persentase Capaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Prov. Kaltim terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan,
maka perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan pengisian SKM
(Survey Kepuasan Masyarakat) pada portal website Bappeda Prov.
Kalimantan Timur, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a) Nilai Indeks = (unsur persyaratan x 0,11) + (unsur sistem,
mekanisme dan prosedur x 0,11) + (unsur waktu penyelesaian x
0,11) + (unsur biaya/tarif x 0,11) + (unsur produk spesifikasi jenis
pelayanan x 0,11) + (unsur kompetensi pelaksanaan x 0,11) +
(unsur penanganan pengaduan, sarana dan masukan x 0,11) +
(unsur sarana dan prasarana x 0,11)
- b) NRR unsur = jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisoner yang
terisi
- c) NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11
- d) IKM = Jumlah NRR tertimbang x 25

Maka nilai survei pelayanan dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (3,193 \times 0,11) + (3,167 \times 0,11) + (3,123 \times 0,11) + (3,228 \times 0,11) + (3,053 \times 0,11) \\ &+ (3,088 \times 0,11) + (3,728 \times 0,11) + (2,991 \times 0,11) + (3,114 \times 0,11) \\ &= 0,354 + 0,352 + 0,347 + 0,358 + 0,339 + 0,343 + 0,414 + 0,332 + 0,346 \\ &= 3,184 \end{aligned}$$

Jadi nilai survey adalah 3,184

Dengan demikian persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda
Prov. Kaltim berdasarkan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)
unit pelayanan kantor adalah sebagai berikut :

- i. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai survey x nilai dasar = 3,184
 $3,184 \times 25 = \mathbf{79,60}$
- ii. Mutu pelayanan **Baik**
- iii. Kinerja Unit Pelayanan **Memuaskan**

Ketercapaian bahkan melampaui target yang telah ditetapkan
pada tahun 2022 disebabkan keberhasilan kinerja Bappeda Prov.

Kaltim dalam menjalankan tugas sebagai perencana yang mempengaruhi nilai survey kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pada indikator sasaran 3 *“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Internal dan Eksternal”*. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan Bappeda Prov. Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Keberhasilan Bappeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan keterbukaan informasi publik yang disampaikan pada website Bappeda secara luas, begitu juga halnya kepada unsur pemerintahan lainnya, seperti Pimpinan Daerah, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga Vertikal, serta Stakeholder terkait yang membutuhkan data dan informasi pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Selain keberhasilan Bappeda dalam memberikan pelayanan, hal yang juga cukup mempengaruhi capaian target nilai survey kepuasan masyarakat tentunya adalah jumlah responden yang mengisi survey pada website Bappeda yang mencapai 114 orang pada tahun 2022. Namun, mengingat intensitas tamu yang datang berkunjung selama satu tahun dalam melakukan koordinasi ke Bappeda Prov. Kaltim, jumlah responden tersebut masih terbilang minim dan masih dapat ditingkatkan melalui Langkah-langkah dalam menjangkau responden untuk mengukur pelayanan yang diberikan Bappeda Prov. Kaltim.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Dikarenakan indikator kinerja merupakan Bagian dari periode perubahan Renstra 2019-2023 yang

memilik tujuan, sasaran dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2019-2023 sebelumnya.

Kemudian jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir perubahan Renstra 2019-2023, capaian realisasi sudah melampaui target dengan tingkat kemajuan 0,05%, hal ini tentunya menunjukkan peningkatan yang sangat positif dan diharapkan pada akhir realisasi kinerja di tahun 2023 tingkat kemajuan capaian realisasi dapat tumbuh lebih baik lagi.

Meskipun capaian pelayanan kinerja Bappeda pada tahun 2022 sudah dapat dikatakan lebih baik, namun perlu adanya beberapa hal perbaikan dan peningkatan sebagai berikut :

1. Bappeda sebagai perangkat daerah penunjang yang memiliki tugas di bidang perencanaan, tentunya harus selalu menjaga dan meningkatkan kinerjanya dalam membantu Gubernur merumuskan kebijakan-kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, tentunya Bappeda membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, harapannya Bappeda Prov. Kaltim dapat memperhatikan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya demi terciptanya sumber daya aparatur Bappeda yang berkualitas.
2. Pengambilan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kinerja dilakukan pada website Bappeda, survey tersebut juga belum sepenuhnya menjangkau perangkat daerah yang menjadi objek penilaian, dan seharusnya tujuan survey tersebut diprioritaskan kepada perangkat daerah yang merupakan objek atas pelayanan yang diberikan Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja Bappeda, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengambilan survey tersebut dapat dilakukan melalui surat resmi yang dilampiri form penilaian dan ditujukan kepada seluruh perangkat daerah yang dapat dilakukan (pertriwulan / persemester / tahunan)

3. Mengingat pelayanan yang diberikan oleh Bappeda tidak terbatas hanya kepada Perangkat Daerah, survey yang dilakukan pada website Bappeda dinilai lebih efektif dibandingkan pengisian form manual yang ditujukan hanya kepada perangkat daerah. Dikarenakan website Bappeda merupakan contoh atas keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat, Pemerintah Kab/Kota, Kementerian/Lembaga maupun instansi vertikal yang membutuhkan informasi pembangunan daerah, saran dan masukan yang diberikan dianggap penting guna meningkatkan kinerja Bappeda sebagai perangkat daerah dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Bappeda dalam meningkatkan kinerjanya, dapat membuat inovasi baru berupa “Klinik Perencanaan” yang menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk berkonsultasi mengenai penyusunan dokumen perencanaan dan hal lainnya yang menyangkut tugas Bappeda, kemudian diakhir sesi pelayanan konsultasi tersebut, perangkat daerah dipandu untuk mengisi form survey kepuasan masyarakat pada website Bappeda

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.22
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022**

1	2	3	%	%	Tingkat Efisiensi
			Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	110,18	84,88	25,3%

Pada tabel 3.20 dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap ketercapaian kinerja Pada indikator Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim juga sudah efisien dengan tingkat efisiensi 25,3% dengan perhitungan $(110,18\% - 84,88\% = 25,3\%)$.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja/penetapan kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79,46% dan telah tercapai sebesar 79,60% dengan capaian 100,18%.
2. Program penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar 31.258.257.956 dan telah terealisasi 26.530.832.674 (84,88%). keberhasilan capaian kinerja 100,18% menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserap sebesar 84,88%, yang juga menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran. Serta capaian penyerapan anggaran pada setiap kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi kinerja program/kegiatan tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Predikat
				K	Rp	K	Rp	
(sasaran 3) Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda secara internal dan eksternal		Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda Prov. Kaltim		79,46		79,60		ST
	(Program 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	%					
		Skor kepuasan masyarakat	%	87	31.258.257.956	79,60	26.530.832.674	ST

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Predikat
				K	Rp	K	Rp	
		terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda						
	(Kegiatan 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Persentase capaian kinerja Bappeda	%	79,46	448.971.400	74,56	449.400.174	T
	(Kegiatan 2) Adm. Keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran Bappeda	%	92	18.241.228.422	88,87	15.208.697.477	ST
	(Kegiatan 3) Adm. Kepegawaian perangkat daerah	Persentase pengembangan kompetensi SDM aparatur	%	78	150.000.000	5,95	22.300.000	SR
	(Kegiatan 4) Adm. Umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	80	3.269.070.000	83,64	2.863.022.155	ST
	(Kegiatan 5) Pengadaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	%	85	641.483.100	100	545.781.038	ST
	(Kegiatan 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang yang terlayani tepat waktu	%	85	5.842.552.776	100	5.279.633.803	ST
	(Kegiatan 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	83	2.161.998.027	87,06	2.161.998.027	ST

Berdasarkan tabel 3.23 dapat dilihat program/kegiatan yang mempengaruhi capaian keberhasilan sasaran kinerja “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal”, dengan lima capaian kegiatan predikat sangat tinggi (ST), satu predikat tinggi (T) dan satu predikat sangat rendah (SR).

Selanjutnya, berkaitan dengan pelayanan Bappeda Prov. Kaltim sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, juga mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi serta aturan pemerintah tentang pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan ataupun bidang lainnya yang selalu diperbarui, untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi

perhatian yang juga tidak kalah pentingnya. Namun pada pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia belum dapat dioptimalkan dengan baik, tergambar dari realisasi yang hanya mencapai 5,95%

Terkait capaian sangat rendah (SR) pada kegiatan adm. kepegawaian perangkat daerah dipengaruhi kurangnya pegawai Bappeda Prov. Kaltim yang mengikuti Bimtek/Diklat, hal ini dikarenakan beberapa orang yang sudah mengajukan dan diusulkan untuk mengikuti bimtek terbentur dengan padatnya jadwal kegiatan Bappeda yang tidak dapat ditinggalkan, kurangnya minat untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan informasi pelaksanaan bimtek yang belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian realisasi kinerja dapat dikatakan baik, namun tetap perlu adanya peningkatan pada kegiatan adm. kepegawaian perangkat daerah dalam pengembangan kompetensi untuk menciptakan sumber daya aparatur Bappeda yang berkualitas.

D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.24
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	85%	93,75%	110,29%	11.670.429.760	11.035.622.206	94,56%
2	Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan	90%	99,61%	110,68%	9.160.309.800	8.727.207.666	95,27%

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam dokumen anggaran						
3	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda secara internal dan eksternal	79,46%	79,60%	100,18%	31.258.257.956	26.530.832.674	84,88%

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

- a. Sasaran Pertama Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah dimana target kinerja 85% dengan realisasi kinerja 93,75% maka persentase pencapaian kinerja adalah 110,29%. Pada alokasi anggaran Rp 11.670.429.760,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.035.622.206,00 maka persentase capaian anggaran adalah 94,56%.
- b. Sasaran Kedua Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dimana target kinerja 90% dengan realisasi kinerja 99,61% maka persentase pencapaian kinerja adalah 110,68%. Pada alokasi anggaran Rp. 9.160.309.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.727.207.666,00 maka persentase capaian anggaran adalah 95,27%.
- c. Sasaran Ketiga Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal dimana target kinerja 79,46% dengan realisasi kinerja 79,60% maka persentase pencapaian kinerja 100,18%. Pada alokasi anggaran Rp. 31.258.257.956,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

26.530.832.674,00 maka persentase capaian anggaran adalah 84,88%.

2. Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2022 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp 52.088.997.516,00 dengan rincian berdasarkan struktur belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 49.303.580.916,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.785.416.600,00. Berikut tabel struktur belanja Bappeda Prov. Kaltim 2022 :

Tabel 3.25
Struktur Belanja BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	49.303.580.916	43.942.408.033	89,13
2	Belanja Modal	2.785.416.600	2.351.254.513	84,41
Jumlah		52.088.997.516	46.293.662.546	88,87

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.258.257.956,00	26.530.832.674,00	84,88
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>488.971.400,00</i>	<i>449.400.174,00</i>	<i>91,91</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.932.900,00	83.606.100,00	88,07
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.315.500,00	44.952.000,00	91,15
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.740.000,00	47.302.400,00	89,69

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158.771.000,00	148.294.872,00	93,40
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.212.000,00	125.244.802,00	94,02
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.241.228.422,00	15.208.697.477,00	83,38
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.421.028.422,00	14.403.507.767,00	82,68
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	815.521.000,00	800.604.210,00	98,17
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.679.000,00	4.585.500,00	98,00
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,00	22.300.000,00	14,87
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	22.300.000,00	14,87
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.269.070.000,00	2.863.022.155,00	87,58
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.251.000,00	100.186.500,00	99,94
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.104.587.000,00	904.582.904,00	81,89
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.500.000,00	334.809.500,00	96,35
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.277.000,00	158.642.000,00	99,60
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.520.000,00	51.060.000,00	85,79
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.912.000,00	2.760.000,00	11,08
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	975.600.000,00	975.022.251,00	99,94
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	497.423.000,00	335.959.000,00	67,54

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E	<i>Pengadaan Baarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	641.483.100,00	545.781.038,00	85,08
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	641.483.100,00	545.781.038,00	85,08
F	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5.842.552.776,00	5.279.633.803,00	90,37
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.417.598.664,00	1.086.403.278,00	76,64
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.414.954.112,00	4.183.230.525,00	94,75
G	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.624.952.258,00	2.161.998.027,00	82,36
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.764.800,00	53.771.910,00	96,43
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.228.510.500,00	1.019.233.863,00	82,97
3	Pemeliharaan Mebel	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.865.000,00	52.260.000,00	97,02
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.811.958,00	702.024.754,00	74,94
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	330.800.000,00	315.507.500,00	95,38
II	<i>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>	11.670.429.760,00	11.035.622.206,00	94,56
1	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>3.836.542.000,00</i>	<i>3.727.158.544,00</i>	<i>97,15</i>

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	199.604.000,00	192.554.000,00	96,47
3	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	298.518.000,00	283.088.170,00	94,83
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.338.420.000,00	3.251.516.374,00	97,40
A	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	2.132.520.900,00	2.116.295.821,00	99,24
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.181.370.400,00	1.168.799.343,00	98,94
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan SKPD	483.568.500,00	481.965.195,00	99,67
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	206.874.000,00	205.117.603,00	99,15
4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	260.708.000,00	260.413.680,00	99,89
B	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5.701.366.860,00	5.192.167.841,00	91,07
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	4.427.456.360,00	4.087.628.642,00	92,32
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	767.265.500,00	628.539.199,00	81,92
3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	506.645.000,00	476.000.000,00	93,95
III	<i>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	9.160.309.800,00	8.727.207.666,00	95,27
A	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	3.344.320.800,00	3.294.070.111,00	98,50
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	635.579.000,00	624.038.310,00	98,18

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	559.610.000,00	557.055.546,00	99,54
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	41.002.000,00	40.748.400,00	99,38
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	784.132.000,00	775.512.201,00	98,90
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.063.429.800,00	1.057.601.502,00	99,45
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	260.568.000,00	239.114.152,00	91,77
B	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	3.119.315.000,00	2.897.849.491,00	92,90
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	636.660.000,00	613.608.862,00	96,38
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	246.922.000,00	226.593.554,00	91,77
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	941.218.000,00	890.065.296,00	94,57

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.640.000,00	392.596.309,00	97,99
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	88.400.000,00	85.996.530,00	97,28
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	805.475.000,00	688.988.940,00	85,54
C	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	2.696.674.000,00	2.535.288.064,00	94,02
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	795.545.000,00	745.196.356,00	93,67
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.088.979.000,00	1.021.219.323,00	93,78
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	812.150.000,00	768.872.385,00	94,67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja tahun 2022. Laporan ini memberikan gambaran capaian strategis Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2022.

LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2022 juga menyajikan data perbandingan capaian kinerja di tahun 2021 dengan tahun 2022 serta tingkat capaian atas target akhir periode Renstra Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019-2023. Data perbandingan capaian kinerja yang disajikan dapat menunjukkan apakah kinerja Bappeda setiap tahunnya mengalami peningkatan ataupun penurunan, kemudian memberikan sinyal kepada Bappeda Prov. Kaltim untuk melakukan perbaikan guna menindaklanjuti hasil pencapaian kerjanya di tahun 2022, berdasarkan analisis yang dilakukan pada Bab III, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi pada implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Bappeda Prov. Kaltim dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -3,63 poin, yang disebabkan oleh pengukuran dan evaluasi kinerja yang belum dilaksanakan secara maksimal
2. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 hanya dilakukan pertahun dimana idealnya pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan ataupun pertriwulan guna melakukan pengendalian atas capaian kinerja dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan perbaikan dengan melakukan pengukuran kinerja secara periodik melalui Aplikasi Evdoren.

3. Capaian kinerja Bappeda Prov. Kaltim menunjukkan realisasi, tingkat capaian, rata-rata tingkat capaian dan predikat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tingkat capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TINGKAT CAPAIAN 2021	TINGKAT CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target	65%	85%	43,09%	93,75%	66,29%	110,29%
2	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	85%	90%	96,97	99,61%	114,08%	110,68%
3	Persentase capaian kinerja pelayanan Bappeda secara internal dan eksternal	-	79,46%	-	79,60%	-	100,18%
Rata-rata tingkat capaian (%)						90,19	107,05
Predikat						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel diatas menunjukkan kesimpulan atas capaian dan peningkatan kinerja Bappeda di tahun 2022, yaitu seluruh indikator kinerja sasaran mencapai target dengan rata-rata tingkat capaian 107,05% dengan predikat Sangat Tinggi dan peningkatan rata-rata tingkat capaian kinerja Bappeda sebesar 16,86%.

4. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dimana tingkat penyerapan anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja yang mencapai target
5. Secara umum penyerapan anggaran pada tahun 2022 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, namun ada satu sub kegiatan yang menunjukkan penyerapan anggaran sangat rendah yaitu pada sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diperuntukan untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur Bappeda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan pandemi Covid 19 yang menyebabkan keterbatasan akses dan mobilitas bagi ASN yang akan mengikuti bimbingan teknis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan saran sebagai bahan perbaikan dan peningkatan sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan dalam hal pengukuran kinerja dan pelaksanaan evaluasi internal dalam rangka menindaklanjuti nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Bappeda yang mengalami penurunan di tahun 2021
2. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala (bulanan/triwulanan /semesteran) guna melakukan pengendalian atas capaian sasaran strategis dan sebagai pengambilan arah kebijakan pimpinan dalam menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
3. Perlu adanya komitmen bersama antara Bappeda Prov. Kaltim dengan seluruh perangkat daerah pengampu program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan koordinasi untuk bersama mengidentifikasi dan mencari solusi atas faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target program/kegiatan pada tahun berjalan

4. Menginventarisir pegawai Bappeda yang belum mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan Menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

LAMPIRAN

REALISASI DAN CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

No	Program Prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
1	[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	%	9,19	10,64	116,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	82	83,3	102,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	70	71	101,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
4	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	1	0,88	88,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS	Kab/Kota	3	3	100,00	Dinas Kesehatan
6	[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	%	100	100	100,00	Dinas Kesehatan
7	[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	%	40	70	175,00	Dinas Kesehatan
8	[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1	100,00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	[PROGRAM] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	Desa	35	35	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10	[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	Desa	30	38	127,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
11	[PROGRAM] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	%	70	62,22	89,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	[PROGRAM] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	31	68,43	221,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	739	697	94,00	Badan Pendapatan Daerah
14	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	%	100	127	127,00	Badan Pendapatan Daerah
15	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	%	5	15,85	317,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16	[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Industri	2	2	100,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	[PROGRAM] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	48.258	151,00	Dinas Kehutanan
18	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.000.000	4.471.286,16	89,00	Dinas Kehutanan
19		2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	700	826,05	118,00	Dinas Kehutanan

No	Program Prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
20	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	297.805,90	293.030,78	98,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
21	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	164.441	161.230	98,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
22	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	162.593	177.514	109,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
23	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2eq	4,067	7,92	195,00	Dinas Perkebunan
24	[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Jenis	3	3	100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
25	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ;	Ha	8.000	8.000	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
26		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	7	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
27	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;	Kelompok	30	36	120,00	Dinas Perkebunan
28		2) Luas Kebun yang dibangun	Ha	1.462.645	1.575.966	108,00	Dinas Perkebunan
29	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49	49	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ;	Ton	279.681	280.665	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
31		2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.592	319.257	113,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
32	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton	#####	17.022.588	94,00	Dinas Perkebunan
33	[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Angka Kelahiran Sapi	%	21	21	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ;	Orang	330	333	101,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
35		2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	Lembaga	4	4	100,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
36	[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga	1	1	100,00	Dinas Perkebunan
37	[PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	35	36	103,00	Dinas Perkebunan
38	[PROGRAM] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	11	5	220,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	%	100	100	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
40	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	%	1	4,84	484,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program Prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
41	[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	%	10	13	130,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
42	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	%	3	36,2	1207,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
43	[PROGRAM] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	23,53	23,53	100,00	Dinas Pariwisata
44	[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	Destinasi	3	3	100,00	Dinas Pariwisata
45	[PROGRAM] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	70.781	70811	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
46	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	meter	3.020	2723,7	90,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
47	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	%	66,64	69,28	104,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
48	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	%	7,34	7,27	99,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
49	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.165.000	1.197.475	103,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
50	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87	85	98,00	Dinas Perhubungan
51	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	%	76	76,95	101,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
52	[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	76,15	77,52	102,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
53	[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	kasus	427	195	219,00	Dinas Perhubungan
54	[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	indeks	0,91	0,92	101,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
55	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ;	Indeks	53,8	53,02	99,00	Dinas Lingkungan Hidup
56		2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ;	Indeks	89,16	87,59	98,00	Dinas Lingkungan Hidup
57		3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;	Indeks	79,86	81,85	102,00	Dinas Lingkungan Hidup
58		4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	Indeks	83,61	81,45	97,00	Dinas Lingkungan Hidup
59	[PROGRAM] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	%	82,67	82,67	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
60	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	indeks	80	97,84	122,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program Prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	Indikator Kinerja Program Prioritas	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
61	[PROGRAM] PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	%	79	89,19	113,00	Sekretariat Daerah
62		Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	%	95	91,89	97,00	Sekretariat Daerah
63		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79	81,03	103,00	Sekretariat Daerah
64	[PROGRAM] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	86,5300006	96,00	Inspektorat

Prioritas pembangunan yang mencapai target dilakukan dengan cara menghitung jumlah dari indikator program prioritas yang memiliki tingkat capaian lebih besar atau sama dengan 91% ($\geq 91\%$) yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dan dianggap telah mencapai target. Adapun target, realisasi dan tingkat capaian program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dapat dilihat pada diatas. Dari total sebanyak 64 prioritas pembangunan, terdapat 60 prioritas pembangunan yang telah mencapai target dan terdapat 4 prioritas pembangunan yang belum mencapai target. Sehingga hasil persentase prioritas pembangunan yang mencapai target diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target = Jumlah Prioritas Pembangunan yang mencapai target / Jumlah seluruh prioritas pembangunan x 100% = 60/64x100% = 93,75%

Penjabaran Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan			
		RKPD-P 2022		APBD-P 2022	
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266	313	266	314
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	22	72	22	72
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	3	11	3	11
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	6	13
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	9	2	9
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	16	44	16	44
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	33	13	34
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	23	12	24
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	11	5	11
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	5	14
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5	16	5	16
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	13	4	13
4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah	16	83	16	83
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	2	19	2	19
5.07.5.07.5.07.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	2	8	2	8
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	3	9	3	9
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	13	3	13
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	4	15	4	15
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	2	11
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	9	2	9
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	11	20	11	20
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16	49	16	49
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	12	41	12	41
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	12	33	12	33
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	34	10	34
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	70	269	70	273
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	21	5	21
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	6	13
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	18	35	18	35
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	5	13	5	13
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15	3	15
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	21	82	21	82
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	27	61	27	61
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	6	27	6	27
Total		614	1452	615	1459

Jumlah Program pada RKPD	614
Jumlah Kegiatan pada RKPD	1452
Jumlah Program dan Kegiatan pada dokumen perencanaan	2066
Jumlah Program pada APBD	615
Jumlah Kegiatan pada APBD	1459
Jumlah Program dan Kegiatan pada Dokumen Penganggaran	2074

Persentase Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
 = $\frac{2066}{2074} \times 100$
 = **99,61** %

PERHITUNGAN SKM BAPPEDA PROV. KALTIM

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2022)									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	2	3	2	2	4	2	3	
2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	
3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
8	3	4	4	3	3	2	4	3	3	
9	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
11	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
12	3	3	3	4	3	4	4	3	3	
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
14	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
15	3	4	3	3	4	2	4	2	3	
16	2	2	2	4	4	2	4	2	2	
17	4	4	3	4	3	4	4	3	3	
18	2	2	2	2	3	3	4	2	2	
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
20	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
21	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
25	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
30	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
31	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
32	3	3	2	3	3	2	4	3	3	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	3	3	3	3	3	4	3	4	
35	4	3	3	4	3	3	4	3	3	
36	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
37	4	3	0	4	4	4	4	4	4	
38	3	3	2	3	2	2	4	3	3	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2022)									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
39	3	4	3	4	3	3	4	4	3	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	3	3	3	4	3	4	4	3	3	
42	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
45	3	3	3	3	3	2	4	3	3	
46	3	3	3	3	3	3	4	1	3	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
48	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
49	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
50	2	4	2	3	2	2	3	2	2	
51	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
52	3	3	3	3	3	2	3	3	3	
53	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
54	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
55	3	3	3	3	3	2	4	3	3	
56	4	4	4	4	3	3	4	3	3	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
59	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
61	3	2	2	2	0	1	2	2	2	
62	3	3	3	2	3	3	4	2	3	
63	3	4	3	3	3	3	4	3	3	
64	3	3	3	3	3	2	4	1	3	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
66	3	3	3	3	2	3	3	0	3	
67	3	3	3	3	2	2	3	3	2	
68	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
71	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
72	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
74	3	3	1	3	3	3	4	3	3	
75	3	3	4	4	3	4	4	0	3	
76	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
77	3	3	3	3	2	3	4	3	3	
78	3	3	3	3	3	3	4	3	3	

No. Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN (TAHUN 2022)									HASIL
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
79	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
80	4	4	3	3	3	4	4	3	3	
81	3	3	3	3	3	4	4	3	3	
82	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
83	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
84	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
85	3	4	3	3	3	3	4	3	3	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
88	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
89	4	4	4	4	3	3	4	3	3	
90	3	3	3	3	3	3	4	4	3	
91	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
92	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
93	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
94	3	3	4	3	3	3	4	3	3	
95	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
96	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100	3	4	3	3	3	4	3	3	3	
101	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
102	3	3	3	3	2	2	4	3	3	
103	4	3	4	3	3	4	4	3	3	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
108	4	4	4	4	4	4	2	4	4	
109	2	2	4	3	3	2	4	1	3	
110	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
111	3	3	4	3	3	4	4	3	3	
112	4	3	3	3	3	2	3	3	4	
113	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
114	3	3	3	3	2	3	3	2	3	
Total Nilai Unsur	364	361	356	368	348	352	425	341	355	
NRR Per Unsur	3,193	3,167	3,123	3,228	3,053	3,088	3,728	2,991	3,114	28,684
NRR Tertimbang	0,354	0,352	0,347	0,358	0,339	0,343	0,414	0,332	0,346	3,184
Nilai SKM Bappeda per 31 Desember 2022										79,60

No	Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan Utama	1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?	2. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	3. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan waktu dalam prosedur pelayanan di unit pelayanan ini?	4. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	5. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan pelayanan?	6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?	7. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan?	8. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan?	9. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan?	Saran perbaikan, masukan dan harapan :
1	12/10/2021 15:49:02	M.Fahrijal Ihsan	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Kurang Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Sesuai	saran dan kritik agar segera ditindak lanjutii segera
2	12/21/2021 8:52:36	Haryanto	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Meningkatkan Pelayanan yang baik dan memberikan informasi kepada Masyarakat luas
3	12/21/2021 9:56:42	Azhar	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Baik dalam pelayanan
4	12/28/2021 14:17:12	Jimmy Herman	Laki-laki	S-2/Pend. Profesi	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Sukses dan maju terus bappeda Kaltim
5	12/28/2021 16:25:07	Edy Suryanto, SE	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	
6	12/28/2021 16:28:05	Natain Siagian	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Lebih di tingkatkan lagi
7	12/28/2021 16:30:14	Agus Herianto	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Ditingkatkan lagu
8	12/28/2021 16:46:57	Alif M	Laki-laki	D-1/D-2/D-3	PNS	Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan
9	12/28/2021 16:48:23	Darmansyah	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sesuai	Pelayanan ini lebih baik lagi.
10	12/28/2021 16:58:23	Wariantio Saputra	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Kordinasi konsultasi lebih ditingkatkan
11	12/28/2021 17:08:07	Burha Alwi	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Harapan saya untuk Pegawai Pindahan dari Bappeda agar bisa menarkan pengalamannya kepada teman-teman di bidang Perencanaan..
12	12/28/2021 17:20:17	Asfiandi	Laki-laki	S-2/Pend. Profesi	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Informasi mudah didapat melalui web Bappeda
13	12/28/2021 17:34:16	Hery Nordi	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Terus tingkatkan pelayanan yang sudah diberikan dan selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan
14	12/28/2021 17:46:18	Mariyah Alqibiyah, S.Sos	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Agar lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan pelayanan publik
15	12/28/2021 17:52:03	Heldiyani	Perempuan	D-4/S-1	Pegawai Instansi Pemerintah	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Sesuai	1. Wajib memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan 2. Agar memiliki kebijakan standar pelayanan 3. memaklumkan standar pelayanan 4. Lakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
16	12/28/2021 19:15:10	A. Rafiq, S.Sos.,M.Si	Laki-laki	S-2/Pend. Profesi	PNS	Kurang Sesuai	Kurang kompeten	Kurang Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Kurang Sesuai	Satu data berfungsi untuk semua
17	12/28/2021 20:13:38	Dharma Yanti	Perempuan	S-2/Pend. Profesi	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Pelayanan dapat diakses online
18	12/28/2021 20:18:41	Ismawardi	Laki-laki	S-2/Pend. Profesi	PNS	Kurang Sesuai	Kurang kompeten	Kurang Mudah	Kurang Sopan dan kurang ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Kurang Sesuai	Agar lebih ditingkatkan pelayanan dan keprofesionalannya
19	12/28/2021 21:07:29	Supatmah	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Sanhat baik
20	12/28/2021 21:37:30	Muhammad Amains	Laki-laki	S-2/Pend. Profesi	PNS	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sangat Sesuai	Evaluasi berkala untuk peningkatan kualitas pelayanan
21	12/28/2021 22:11:54	Yudi	Laki-laki	D-4/S-1	Wirawasta/Wirusaha	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Masalh sarana saja ,,agar ditingkatkn kembali
22	12/28/2021 22:12:40	Adi	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai Swasta	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Bagus
23	12/28/2021 22:13:25	Mery	Perempuan	S-2/Pend. Profesi	Pegawai/BUMN/BUM D	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Lebih bagus
24	12/28/2021 22:14:33	Maya	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Sesuai
25	12/28/2021 22:23:33	Andhika Satrya	Laki-laki	D-4/S-1	Pegawai/BUMN/BUM D	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Sesuai
26	12/28/2021 22:24:32	Izul Hazairin	Laki-laki	D-1/D-2/D-3	Wirawasta/Wirusaha	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Bagus
27	12/28/2021 22:25:46	Ninis Ramadhani	Perempuan	D-1/D-2/D-3	Pelajar/Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Sesuai
28	12/28/2021 22:26:37	Indah Kanaya	Perempuan	D-4/S-1	Pelajar/Mahasiswa	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Puas
29	12/28/2021 23:09:41	Subhan	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Pegawai Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Tingkatkan kinerja
30	12/29/2021 8:22:44	Wakidi	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Selalu berinovasi untuk pelayanan yang sangat mudah
31	12/29/2021 10:27:23	Noor Ani	Perempuan	D-4/S-1	Non PNS	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sesuai	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	pelayanan yang ada telah baik
32	12/29/2021 10:29:08	Johan	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Kurang Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga lebih baik lagi
33	12/29/2021 10:31:39	Andik Isdianto	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Non ASN	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Mantap
34	12/29/2021 13:53:55	Nanik Purwantiningsih	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sangat Sesuai	agar lebih ditingkatkan di bidang layanan yang ada, untuk perbaikkan dan ke baikkkan kedepannya. Bappeda terarah dan Laju, Kaltim Maju, aamin....
35	12/29/2021 15:31:50	Tony K S	Laki-laki	D-4/S-1	Karyawan Honorer	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Good
36	12/29/2021 15:48:28	Wirayudha Nugraha	Laki-laki	D-4/S-1	Non ASN	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	-
37	1/1/2022 10:13:01	Petrus efrandio hibo	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sangat Sesuai	Kompeten	Sangat Tidak Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Saran dan sya dalam tarif biaya nya tolong megerri dengan keadaan ekonomi seorang
38	1/1/2022 14:37:01	Juhaman	Laki-laki	D-4/S-1	Wirawasta	Sesuai	Kompeten	Kurang Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga pelayanan nya bsa lebih baik lagi
39	1/2/2022 19:50:45	Renita, S.Hut	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sesuai	Tingkatkan pelayanan dan selalu lebih baik lagi ke depannya
40	1/3/2022 15:23:23	Dany Fachriza	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	lanjutan
41	1/3/2022 17:03:12	Meryam	Perempuan	D-4/S-1	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	sudah sesuai, bagus
42	1/5/2022 20:22:59	Sari	Perempuan	D-4/S-1	Tenaga Honorer	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	-
43	1/19/2022 21:06:50	Uni Kholfatus Saniah	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	-
44	1/28/2022 10:33:47	Rahma Sunyanan	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	Pertahankan
45	1/27/2022 12:04:38	rama mahesa	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	tingkatkan modernisasi peralatan
46	2/9/2022 10:26:50	ijan	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Ada tetapi tidak berfungsi	Sesuai	dipertahankan terus menerus

No	Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan Utama	1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?	2. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	3. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit pelayanan ini?	4. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap terkecil kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	5. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?	7. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan?	8. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan?	9. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara dengan standar pelayanan dengan yang diberikan?	Saran perbaikan, masukan dan harapan :	
47	2/13/2022 23:25:10	Endah Ernany T	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Petunjuk ruang bidang2 dan ruang rapat perlu dibuat untuk memudahkan tamu	50 tahun ke atas
48	2/17/2022 14:01:20	Purwanto	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sesuai	Terus pertahankan dan tingkatkan	40-49 tahun
49	2/19/2022 7:50:14	Wahyudi	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga bermanfaat	20-29 tahun
50	2/24/2022 8:06:28	Surya darma	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Kurang Sesuai	Kurang kompeten	Kurang Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Mahal	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Kurang Sesuai	Buat lebih maju	30-39 tahun
51	2/25/2022 14:09:36	Indah Dee	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	lebih ditingkatkan	40-49 tahun
52	3/1/2022 23:09:41	Baik	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga kedepan terus lebih baik lagi	30-39 tahun
53	3/4/2022 22:00:59	Dharma	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	30-39 tahun
54	3/8/2022 20:37:56	Muhammad	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Lanjutan dan sangat membantu	40-49 tahun
55	3/10/2022 8:18:57	januar	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	0	30-39 tahun
56	3/13/2022 17:46:54	yogi gunara	Laki-laki	D-4/S-1	Honoror	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Terus ditingkatkan	20-29 tahun
57	3/14/2022 9:39:51	Rudi	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Pertahankan	50 tahun ke atas
58	3/14/2022 15:55:35	fryma	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	tingkatkan	30-39 tahun
59	3/25/2022 19:23:45	Tya	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Gak ad	20-29 tahun
60	3/27/2022 10:33:00	jp	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	20-29 tahun
61	3/28/2022 12:28:11	Ohngki almus	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Wirawasta	Sesuai	Kurang kompeten	Kurang Mudah	Kurang Sopan dan kurang ramah	Sangat Tidak Cepat	Buruk	Cukup Mahal	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Tidak Sesuai	Habisi praktek knn dan korupsi	20-29 tahun
62	3/31/2022 15:02:54	Erwin Dharmawan	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Kurang Sopan dan kurang ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Sesuai	pertahanan kualitas pelayanan terutama pada pengembangan SDM	40-49 tahun
63	4/4/2022 0:30:48	Ali Mudzakkir Hamidi	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga Bappeda dapat memajukan pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	20-29 tahun
64	4/5/2022 9:58:00	heriyanto	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Ada tetapi tidak berfungsi	Sesuai	bandwith ditingkatkan, website sering diupdate	40-49 tahun
65	4/20/2022 9:02:34	Shindy Ariska Putri	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Mohon untuk lebih ditingkatkan lagi	20-29 tahun
66	4/21/2022 4:33:48	YULIANSYAH	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Baik	Murah	Tidak ada	Sesuai	Perbaiki lagi	30-39 tahun
67	4/21/2022 8:49:39	Asfian	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Mahal	Dikelola dengan baik	Kurang Sesuai	baik	20-29 tahun
68	4/22/2022 15:10:55	Wawan	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Mantap	20-29 tahun
69	5/1/2022 12:13:45	Heri Warsito	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Lebih baik lagi	40-49 tahun
70	5/11/2022 20:31:08	M. Ali Akbar	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	20-29 tahun
71	5/24/2022 7:15:23	Suriansyah	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Kami harapkan Bappeda Kaltim lebih meningkatkan layanannya terutama kepada Bappeda Kab/Kota. Salah satunya fasilitasi dalam memperoleh informasi yang utuh terkait SIPD.	40-49 tahun
72	6/7/2022 13:39:46	Rudi Rahmadi	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Wirawasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga ada peningkatan kualitas pelayanan	50 tahun ke atas
73	6/15/2022 8:35:43	Rizqa R Hardiana	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Izin dida,am website di beikan kolom pencarian untuk memudahkan sebakinya diberikan semacam pelatihan bagaimana mengelola SIPD dengan bawah sampai pada tingkat yayaan atau lembaga terkait sampai pada desa dan kecamatan	20-29 tahun
74	6/16/2022 19:42:36	sujuono	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Tidak Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga bappeda prov kaltim. tetap maju dan menjdi percontohan bagi perangkat daerah lain	50 tahun ke atas
75	6/20/2022 12:04:48	Ida	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Tidak ada	Sesuai	Semoga bappeda prov kaltim. tetap maju dan menjdi percontohan bagi perangkat daerah lain	30-39 tahun
76	6/21/2022 14:08:21	Zaqueena	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	harap lebih baik lagi	20-29 tahun
77	6/23/2022 11:54:55	Kendy Ega Pratama	Laki-laki	D-4/S-1	Honoror	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	baik	20-29 tahun
78	6/29/2022 11:04:51	bro	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	tingkatkan	40-49 tahun
79	7/7/2022 9:03:00	lince	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	pertahankan	30-39 tahun
80	7/13/2022 19:44:21	indah	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	lebih ditingkatkan lagi	40-49 tahun
81	7/14/2022 10:34:11	Yogi Gunara	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	30-39 tahun
82	7/19/2022 11:38:28	Hendi	Laki-laki	D-4/S-1	PPBASN	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	lebih di tingkatkan lagi kolaborasi lintas sektor	30-39 tahun
83	7/24/2022 18:57:30	Valentina	Perempuan	D-4/S-1	Kompeten	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Baik	40-49 tahun
84	7/28/2022 8:17:21	Septa Ade Prima	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Sudah cukup baik	30-39 tahun
85	7/28/2022 10:28:26	Theophilus David	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Pelayanannya sudah cukup baik	30-39 tahun
86	8/8/2022 7:58:01	Mualim	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Bagus	30-39 tahun
87	8/15/2022 14:22:16	jabariah	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	semua pelayanan sudah sangat baik	40-49 tahun
88	8/19/2022 9:30:51	Juradi	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Tingkatkan terus kinerja semoga sukses	50 tahun ke atas
89	8/25/2022 11:14:16	INDAH	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	lebih ditingkatkan	40-49 tahun
90	8/30/2022 13:12:36	duddy mahendra	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sesuai	sudah bagus perlu dipertahankan	30-39 tahun
91	9/6/2022 11:03:45	M. Adabi	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Sudah baik, perlu dikembangkan sangat baik lagi	20-29 tahun
92	9/29/2022 11:47:55	Dendy	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederajat	Mahasiswa	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Bagus dan ditingkatkan	30-39 tahun
93	10/13/2022 9:36:44	Aniana	Perempuan	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	jaya dan lebih meningkatkankan ke arah	40-49 tahun

No	Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan Utama	1. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?	2. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?	3. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit pelayanan ini?	4. Bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku terkait kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	5. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana?	7. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan?	8. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan?	9. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan?	Saran perbaikan, masukan dan harapan :	
94	10/14/2022 11:08:28	Agus Ferdian	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Swasta	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Pembangunan Kalimantan Timur yang	30-39 tahun
95	10/18/2022 15:12:49	Celomita Aurelia	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	20-29 tahun
96	10/24/2022 10:30:50	andi muhammad azmi maulana	Laki-laki		non_pns	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	meningkatkan dan manambah segala pelayanan	20-29 tahun
97	10/24/2022 14:55:25	Guntur	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
98	10/24/2022 14:55:50	Junia	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Swasta	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
99	10/27/2022 16:14:35	Selviana Ubung	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
100	10/27/2022 16:14:44	Nur suhaila	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Sangat kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
101	10/27/2022 16:14:49	Sherina salsabila	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
102	10/27/2022 16:15:23	Ahmad Haichir Rizqi	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai		20-29 tahun
103	10/30/2022 14:29:00	andrey kurniawan	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	banyak di informasikan kepada	30-39 tahun
104	11/11/2022 14:25	Rio Naftali	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	-	20-29 tahun
105	11/14/2022 19:06	rw	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Wirawasta	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	mantap	50 tahun ke atas
106	11/17/2022 15:02	Fikri Jufri	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Murah	Dikelola dengan baik	Sesuai	Semoga lebih baik lagi	50 tahun ke atas
107	11/22/2022 13:34	ARIF	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	MANTAP	30-39 tahun
108	11/25/2022 18:28	TES	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Swasta	Sangat Sesuai	Sangat kompeten	Sangat Mudah	Sangat Sopan dan ramah	Sangat Cepat	Sangat Baik	Cukup Mahal	Sangat dikelola dan cepat ditindaklanjuti	Sangat Sesuai	TIDAK ADA	30-39 tahun
109	11/25/2022 23:29	Feri	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Swasta	Kurang Sesuai	Kurang kompeten	Kurang Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Gratis/tanpa biaya	Ada tetapi tidak berfungsi	Sesuai	langsung di proses saja. menunggu surat	20-29 tahun
110	12/2/2022 11:14	ales	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	okee	30-39 tahun
111	12/8/2022 15:45	Jane	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Swasta	Sesuai	Kompeten	Sangat Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Sangat Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	sudah sesuai	30-39 tahun
112	12/11/2022 21:42	Valentinus	Laki-laki	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sangat Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Cukup	Murah	Dikelola dengan baik	Sangat Sesuai		20-29 tahun
113	12/27/2022 13:37	Andrie Asdi	Laki-laki	D-4/S-1	PNS	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Cepat	Baik	Gratis/tanpa biaya	Dikelola dengan baik	Sesuai	Pelayanan sudah mulai baik	50 tahun ke atas
114	12/28/2022 13:44	Z	Perempuan	SMA/SMK/MA/ sederaja	Mahasiswa	Sesuai	Kompeten	Mudah	Sopan dan ramah	Kurang Cepat	Baik	Murah	Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti	Sesuai	-	20-29 tahun



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat : Jalan Kusumo Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp. 0541-742283

